

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Hartina, 2009).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas

untuk menegakkan akuntabilitas financial,, pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*).

Untuk merealisasikan semua itu, tentunya harus ada usaha dari pemerintah maupun pimpinan-pimpinan dari berbagai instansi pemerintah. Pimpinan seharusnya menerapkan sistem pengendalian yang baik dan tegas dalam instansi yang dipimpinnya, baik itu pengendalian intern maupun ekstern.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu:

1. keterandalan pelaporan keuangan,
2. efisiensi dan efektivitas operasi, dan
3. kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan

dinamakan pengendalian intern administratif, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah menjadi hal menarik untuk diteliti, mengingat pentingnya penyajian laporan keuangan yang berkualitas untuk kemajuan perusahaan atau instansi. Karenanya, peneliti bermaksud melakukan penelitian di salah satu instansi pemerintah di Gorontalo terkait dengan aktivitas pengendalian.

Menurut Sukrisno (2004, 76) Aktivitas pengendalian terdiri atas:

1. *review* terhadap kinerja
2. pengolahan informasi
3. pengendalian fisik
4. pemisahan fungsi

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Fadli, (2009) mengenai aktivitas pengendalian. Dengan judul penelitian Tinjauan Aktivitas Pengendalian Atas Penjualan Pada PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk. Medan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk. Medan telah melakukan aktivitas pengendalian atas penjualan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah dijalankannya otorisasi transaksi, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen, pengendalian fisik atas aktiva dan pemeriksaan independen atas kinerja.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Fadli, hanya saja ada sedikit perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Jika Fadli meneliti

tentang Aktivitas Pengendalian atas Penjualan, maka Peneliti akan meneliti tentang Aktivitas Pengendalian dalam Penyajian Laporan Keuangan, dimana yang menjadi objek penelitian adalah salah satu instansi pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Gorontalo.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo semenjak berdirinya tahun 2002 telah melakukan berbagai kegiatan khususnya penguatan kelembagaan dan penguatan hak hak rakyat melalui Program Kegiatan Pengelolaan di bidang pertanahan. Rencana Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo disusun sebagai aplikasi atau penjabaran dari Renstra Badan Pertanahan Nasional R.I, dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah Gorontalo.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo menaungi 6 (enam) Satuan Kerja terdiri dari 1 (satu) Kantor Pertanahan Kota dan 5 (lima) Kantor Pertanahan Kabupaten yaitu:

1. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango.
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada petugas akuntansi di Kanwil BPN Provinsi Gorontalo dapat diidentifikasi fenomena permasalahan yang ada pada instansi tersebut saat ini terkait dengan aktivitas pengendalian yakni mengenai pemisahan fungsi yang belum jelas adanya pada sub bagian Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, dimana fungsi perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan fungsi pelaporan keuangan hanya ditangani oleh satu petugas yakni petugas akuntansi, yang seharusnya kedua fungsi tersebut harus dipisahkan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya kinerja dari pegawai tersebut dan kurang optimalnya informasi yang disajikan sehingga laporan keuangan BPN Provinsi secara nasional sering menyandang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dilandasi alasan dan pertimbangan di atas, menilai pentingnya aktivitas pengendalian dalam pencapaian tujuan, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam tugas akhir ini, dengan judul: **“Penerapan Aktivitas Pengendalian Dalam Penyajian Laporan Keuangan di Kanwil BPN Provinsi Gorontalo”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan aktivitas pengendalian di Kanwil BPN Provinsi Gorontalo dalam penyajian laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah yakni bagaimana penerapan aktivitas pengendalian dalam penyajian laporan keuangan di Kanwil BPN Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aktivitas pengendalian dalam penyajian laporan keuangan yang ada pada Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan bahan bacaan bagi masyarakat dan peneliti yang ingin melanjutkan penelitian tentang aktivitas pengendalian.
 - b. Menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya, baik secara teoritis maupun empiris sesuai dengan variabel-variabel yang diamati.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak BPN untuk lebih memaksimalkan aktivitas pengendalian yang sudah diterapkan.
 - b. Lebih meyakinkan pihak BPN dalam mempertimbangkan maupun mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan.